

### BAB 3

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN

### 3.1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat secara Global

Secara umum atau secara global, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan negara Paman Sam tersebut untuk memperluas pengaruh demokrasi mereka ke seantero penjuru dunia atau dengan kata lain melakukan demokratisasi secara internasional.

Kebijakan atau Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Ini pula yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Amerika Serikat<sup>1</sup>.

Oleh sebab itu, setiap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikeluarkan dengan dalih untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, tetap saja pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasional Amerika sendiri dan yang terpenting kebijakan tersebut dapat memenuhi atau menjadi jalan bagi pencapaian tujuan Amerika Serikat yang sesungguhnya.

Sesuai dengan penulisan Tesis ini yang membatasi periode hanya sebatas dari tahun 1997 hingga 2008 dimana Iran diperintah oleh dua Presiden berkuasa yang sama-sama memberikan kejutan ketika pemilihan umum berlangsung di negeri

---

<sup>1</sup> Wadjdi, Farid, "Politik Luar Negeri Amerika Pasca 'Tragedi WTC'", posted on April, 15, 2008, <http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luar-negeri-amerika-pasca-%E2%80%98tragedi-wtc%E2%80%99/> diakses pada tanggal 23 September 2009

para Mullah tersebut, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sendiri juga dibatasi periodenya dimana pada saat itu negara Paman Sam tersebut diperintah oleh dua Presiden berbeda yaitu Bill Clinton dan George W. Bush.

William Jefferson Clinton yang lebih dikenal dengan nama Bill Clinton merupakan Presiden Amerika ke-42 memerintah negara tersebut dari tanggal 20 Januari 1993 hingga 20 Januari 2001. Sementara Presiden Amerika ke-43, George Walker Bush memerintah dari tanggal 20 Januari 2001 dan berakhir pada 20 Januari 2009. Kedua tokoh tersebut sama-sama menjabat menjadi Presiden Amerika untuk masa dua periode berturut-turut. Apabila disesuaikan dengan pembatasan periode penulisan Tesis ini, maka kebijakan luar negeri Amerika juga dibatasi hanya selama masa pemerintahan Clinton yang kedua dan masa pemerintahan Bush untuk dua periode berturut-turut. Oleh sebab itu, tidaklah mengejutkan bila kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan program nuklir Iran lebih dominan terlihat kaitannya pada masa pemerintahan George W. Bush. Hal itu juga berkaitan dengan beberapa peristiwa seperti kejadian 11 September 2001 yang menyebabkan Bush mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberi perlindungan lebih terhadap keamanan nasional bangsa Amerika Serikat.

Setelah Perang Dingin usai dan Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara adikuasa, banyak pihak berpendapat bahwa umat manusia dikuasai Amerika Serikat. Bahkan Francis Fukuyama mengatakan, sekarang sejarah telah berakhir (dalam bukunya *The End of History and the Last Man*). Ia berpendapat bahwa umat manusia tidak ada pilihan lain dari pada mengikuti pola kehidupan dan sistem politik Amerika. Sikap Amerika Serikat menunjukkan tekad menguasai dunia dan umat manusia atas dasar unilateral. Sikap unilateral Amerika Serikat itu menghendaki bahwa umat manusia harus menerima segala kebijaksanaan Amerika Serikat karena itu adalah kebijaksanaan yang benar buat umat manusia dan buat setiap bangsa di dunia. Amerika Serikat bersikap demikian karena ia merupakan satu-satunya kekuatan yang menguasai dunia atas dasar kemampuan militer, ekonomi dan kemampuan politiknya. Namun tidak semua negara mendukung atau setuju dengan sikap unilateral Amerika, mereka berpendapat bahwa umat manusia sebaiknya mengembangkan sikap multilateral. Tidak hanya

kekuatan Amerika Serikat yang harus menjamin perdamaian dan kesejahteraan dunia, tetapi juga kekuatan Eropa, Cina, dan Jepang. Mereka menyadari bahwa kekuatan militer Amerika Serikat memang tidak ada yang menyamai, tetapi kekuatan ekonomi Amerika Serikat sekalipun masih terbesar di dunia namun dalam kenyataan amat tergantung pada kekuatan ekonomi Eropa, Jepang dan bangsa-bangsa lain.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor yang mendorong sikap arogansi dan kecenderungan unilateral negara Amerika Serikat:

1. Rubuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin menyebabkan Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Tidak ada lagi kekuatan pengimbang yang setara yang mampu bertindak sebagai penghalang bila Amerika Serikat berkeinginan untuk mengambil tindakan sesuai dengan kepentingannya sendiri.
2. Kekuatan ekonomi Amerika yang melebihi Uni Eropa dan Jepang. Ada asumsi yang mengatakan bahwa globalisasi ekonomi semakin meningkatkan ketergantungan antar negara-negara di dunia. Namun pada kenyataannya asumsi itu tidak sepenuhnya benar, karena yang terjadi sekarang dan dapat kita lihat sendiri bahwa ternyata negara-negara berkembang justru jauh lebih bergantung pada negara-negara maju. Secara angka dapat dilihat bahwa ketergantungan Amerika Serikat terhadap perdagangan internasional relatif rendah karena ternyata 90 persen dari produksinya untuk konsumsi dalam negeri saja. Sementara pasar Amerika justru menjadi tujuan utama bagi ekspor dari negara-negara lain.
3. Kemampuan militer yang dimiliki Amerika Serikat merupakan kekuatan militer terbesar di dunia dan cenderung mengalami perkembangan yang signifikan. Selama Perang Dingin, politik internasional lebih condong ke arah militerisme dimana kemampuan militer menjadi penentu utama hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dingin berakhir,

---

<sup>2</sup> Suryohadiprojo, Sayidiman, "Unilateralisme VS Multilateralisme", <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/12/> diakses pada tanggal 13 Nopember 2009 pada pukul 22.00

sebagian besar negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut (Rusia dan negara-negara Eropa Barat) telah mengurangi anggaran militer mereka. Namun Amerika Serikat tetap mempertahankan anggaran militer mereka yang tinggi seperti sewaktu Perang Dingin masih berlangsung. Anggaran belanja militer negara Amerika Serikat melebihi total anggaran militer dari tujuh negara dengan anggaran belanja militer terbesar lainnya.

Sebelum peristiwa kelabu pada tanggal 11 September 2001, unilateral Amerika Serikat lebih berorientasi ke dalam yang ditujukan untuk melindungi kepentingan Amerika secara langsung tanpa mengubah tatanan internasional yang telah berlaku. Namun setelah musibah yang dikenal dengan peristiwa 9/11, kebijakan unilateralisme Amerika Serikat lebih diarahkan keluar, dimana tidak hanya terfokus untuk menghancurkan ancaman atau bahkan hanya sebatas potensi ancaman tapi juga terfokus untuk mengubah lingkungan strategis sesuai perspektif dan kepentingan Washington.

Dalam menjalankan Politik luar negerinya, Amerika Serikat bertumpu pada lima prinsip utama, yaitu<sup>3</sup> :

1. Aliansi Amerika Serikat dengan Eropa dan Asia merupakan landasan keamanan nasional yang tercermin dengan pembaruan aliansi Amerika Serikat dengan negara Jepang dan revitalisasi NATO dari alliansi Perang Dingin ke arah demokrasi baru yang didukung oleh komitmen Amerika Serikat.
2. Perdamaian dan keamanan bagi Amerika Serikat ditentukan oleh hubungan yang konstruktif dengan negara-negara bekas musuh seperti dengan Rusia dan Cina.
3. Konflik lokal mempunyai konsekuensi global, dengan demikian Amerika Serikat akan berupaya meredam kemungkinan meluasnya konflik khususnya yang berpotensi membahayakan kepentingan nasionalnya.

---

<sup>3</sup> diuraikan oleh Penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Samuel Bergr pada saat ceramah di Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington D.C. pada 19 Oktober 2000

4. Dengan munculnya ancaman-ancaman baru sebagai dampak terhadap kemajuan teknologi seperti pencemaran lingkungan hidup dan isu penyakit menular seperti AIDS, Amerika Serikat memobilisasi sumber-sumber nasional dan internasional.
5. Integrasi ekonomi ditujukan untuk perluasan perdagangan dunia yang antara lain dapat dicapai melalui kerjasama internasional seperti NAFTA dan WTO.

Pada intinya, dalam menjalankan politik internasionalnya ada dua pilar utama yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat yaitu, demokratisasi (termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan HAM) dan liberalisasi ekonomi dunia.

Untuk proses perumusan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif yakni Presiden dapat<sup>4</sup>:

1. Memberikan respon atas peristiwa internasional.
2. Mengajukan proposal kepada kongres.
3. Melakukan negosiasi terhadap perjanjian internasional.
4. Memberikan statement kebijakan.
5. Melakukan aksi independent.

Sementara itu mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh legislatif :

1. Memberikan statement kebijakan dan resolusi.
2. Memberikan arahan legislative.
3. Melakukan pressure legislative.
4. Melakukan pembatasan-pembatasan legislatif seperti menolak pembiayaan.
5. Memberikan saran informal kepada eksekutif.
6. Memberikan pandangan kongres atas suatu proposal yang disampaikan oleh eksekutif.

---

<sup>4</sup> Grimmett, Richard F. "Foreign Policy Roles of the President and Congress, <http://fpc.state.gov/6172.htm> diakses pada 13 Nopember 2009.

Itu semua adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dilihat secara umum, sementara secara khusus pada masa pemerintahan Bill Clinton dan George W. Bush kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak ada perbedaan mendasar, Amerika Serikat tetap mengedepankan penyebaran demokrasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Namun semenjak peristiwa 9/11, arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat berubah menjadi lebih terfokus pada perang terhadap teroris. Hal tersebut makin diperjelas dengan dikeluarkannya *The National Security Strategy of the United States*, yang dianggap sebagai dokumen yang mewakili kebijakan luar negeri Presiden Bush sebagai pernyataan perang terhadap terorisme.

Pada saat memerintah dan bahkan pada masa-masa kampanyenya, Bill Clinton selalu menekankan pada permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu untuk kebijakan luar negerinya sendiri, Clinton memang terfokus pada tantangan dalam menghadapi globalisasi. (*President Bill Clinton had come to office on the basis that the key issue was the US economy, and thus in foreign policy terms that the main thrust would be in responding to the challenges of globalisation*<sup>5</sup>).

Dalam menyusun dan menjalankan kebijakan luar negeri bagi Amerika Serikat, Bill Clinton berpegang teguh pada prinsip *engagement* dan *enlargement*. Amerika Serikat harus berperan serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan regional suatu negara sebelum permasalahan tersebut menyebar menjadi permasalahan internasional (*engagement*), salah satu cara penyelesaian konflik dunia adalah dengan penyebaran dasar-dasar demokrasi Amerika Serikat ke seluruh penjuru dunia (*enlargement*), karena dengan begitu Amerika Serikat dapat menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain dan pada intinya dapat mengendalikan tatanan dunia internasional di bawah kekuasaan Amerika Serikat.

Sementara pada masa kekuasaan Presiden George W. Bush, kebijakan luar negerinya lebih terfokus pada upaya memerangi terorisme. Karena memang pada masa pemerintahannya, peristiwa 11 September 2001 terjadi dan menyebabkan Bush mengeluarkan Doktrin Bush yang kemudian menjelma ke dalam dokumen

---

<sup>5</sup> Webber, Mark and Michael Smith, "Foreign Policy In A Transformed World", Pearson Education Limited, 2002, hal. 115

yang bernama National Security Strategy (NSS). Namun tetap Bush tidak lupa untuk memikirkan kepentingan ekonomi Amerika.

Secara khusus, dalam buku putih kebijakan pertahanan Amerika Serikat disebutkan hubungan eksplisit antara perluasan perdagangan bebas dengan pengurangan ancaman terorisme, sebagai berikut: “AS akan aktif bekerja untuk mengembangkan demokrasi, pembangunan, pasar bebas dan perdagangan bebas ke seluruh pelosok dunia. Peristiwa 11 September 2001 telah mengajarkan bahwa sebuah negara lemah seperti Afghanistan bisa menjadi ancaman serius bagi kepentingan nasional bangsa besar seperti Amerika Serikat. Kemiskinan memang tidak membuat orang miskin menjadi teroris dan pembunuh. Akan tetapi kemiskinan, lemahnya lembaga-lembaga negara, dan korupsi bisa membuat negara-negara yang lemah menjadi rawan terhadap jaringan teroris yang beroperasi di dalam wilayah perbatasannya”<sup>6</sup>

Dahulu, Clinton menggunakan kerjasama perdagangan dan integrasi ekonomi sebagai jembatan untuk menuju kestabilan dan kemakmuran bersama. Namun Bush yang menggantikan kedudukannya, meyakini bahwa hanya dengan kerjasama keamanan dan bersatupadunya seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dalam memerangi terorisme barulah kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Jika ditarik kesimpulan maka dapat dikatakan bahwa Clinton memakai jalan ekonomi menuju keamanan dan kemakmuran bersama (*economic road to security and prosperity*), maka Bush menggunakan jalan keamanan untuk menuju kemakmuran bersama (*security road to prosperity*).<sup>7</sup>

Dari situ dapat dilihat fokus utama dari kebijakan luar negeri kedua Presiden berbeda tersebut. Clinton terfokus pada permasalahan ekonomi sementara Bush pada permasalahan keamanan internasional atau lebih tepatnya pemusnahan terorisme secara global.

---

<sup>6</sup> Silaen, Victor, “Kebijakan Politik Global AS Pasca-Perang Dingin”, yang terdapat dalam Jurnal Politika Volume 2, No.1, tahun 2006

<sup>7</sup> ibid

### **3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah**

Secara khusus kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tidak jauh berbeda dengan kebijakan luar negeri Amerika secara global atau secara umum. Namun memang khusus bagi negara-negara di kawasan padang pasir ini, ada beberapa faktor khusus yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan pada sub bab-sub bab berikutnya.

#### **3.2.1. Faktor Internal**

##### **3.2.1.1. Kebutuhan akan Minyak**

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah tidak dapat dilepaskan dari kepentingan utamanya yaitu ketergantungan negara tersebut terhadap bahan bakar minyak. Sumber energi di negara Paman Sam itu adalah minyak sebesar 30%, gas alam 24%, dan batubara sebesar 23%. Amerika Utara mengkonsumsi minyak lebih dari 21 juta barel per hari, jumlah tersebut lebih besar dibanding kebutuhan negara-negara lain<sup>8</sup>.

Isu mengenai keinginan Amerika untuk menguasai minyak memang marak terdengar pada masa pemerintahan Bush karena pada umumnya, pemerintahan Bush mendapatkan dukungan dan bantuan dari para pejabat yang berkecimpung di bidang minyak. Bahkan keluarga Bush sendiri merupakan pemilik perusahaan minyak yang bernama Arbersto Oil yang kemudian setelah mengalami perkembangan pesat berganti nama menjadi Harkeen Oil and Gas.

Sebagian besar dari nama-nama besar pejabat pemerintahan Bush tumbuh dalam kultur politik minyak; Dick Cheney dengan Halliburton; Rice dengan Chevron; demikian juga Donald Evans. Bahkan, seorang utusan Mullah Omar, pimpinan Taliban, pernah datang ke AS dalam misinya mencari modal buat Afganistan. Ia

---

<sup>8</sup> Austin, Andrew. "Di Balik Kebijakan Perang Bush di Asia Tengah dan Timur Tengah." *The Bush Gang; Kelompok Elit yang Menghancurkan Serangan Neo-KONServatif terhadap Demokrasi dan Keadilan*. Ed. Bernd Hamm. Terj., Lensi Mursida, PT. Ina Pubikatama Jakarta, 2006, hal. 86



ditemani oleh Laili Hems dari CIA. Perlu diketahui juga, banyak perusahaan minyak ini merupakan sumber dana bagi kampanye Bush. Enro, misalnya, merupakan donatur terbesar bagi kampanye Bush tahun 2000 kemarin. Dalam negara kapitalis seperti Amerika Serikat, penyumbang ini akan berperan besar dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri AS<sup>9</sup>.

Seperti yang kita semua telah ketahui bahwa cadangan minyak terbesar adalah di kawasan Timur Tengah dan di negara Irak merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Hingga akhir musim semi 2002, Amerika Serikat memperoleh 800 ribu barel minyak per hari dari Irak yang membuat negara itu menjadi sumber minyak terpenting keenam untuk konsumsi Amerika Utara. Saat Bush memamerkan kekuatan senjata, mengancam menyerang karena perbedaan dengan rezim Saddam Husein, perusahaan minyak mengalihkan ke pemasok lain, sehingga memangkas ekspor minyak Irak hingga 70%. Meski demikian, perusahaan minyak Amerika mengantisipasi, minyak dari Irak akan kembali mengalir setelah ketegangan berakhir dan sanksi PBB dicabut sehingga harga minyak turun kembali. Dan memang penting sekali menurunkan harga minyak. Dan kemungkinan sumber bahan bakar minyak murah dan besar-besaran juga menjadi kepentingan negara lain seperti negara Rusia, Eropa, dan Cina yang perusahaannya pernah melakukan perundingan untuk mendapatkan kontrak dengan rezim Saddam sebelum perang pecah.

Namun, kemudian Amerika di bawah kepemimpinan Bush telah menjadwalkan untuk menyingkirkan Saddam. Dengan menyingkirkan Partai Baath, Bush akan dapat menghapuskan negosiasi kontrak dengan negara lain dan kemudian Amerika Serikat akan dapat mengelola ladang minyak di Irak dengan tujuan

---

<sup>9</sup> Wadjdi, Farid, "Politik Luar Negeri Amerika Pasca 'Tragedi WTC'", posted on April, 15, 2008, <http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luar-negeri-amerika-pasca-%E2%80%98tragedi-wtc%E2%80%99/> diakses pada tanggal 23 September 2009

apalagi kalau bukan untuk menguasai minyak Irak dan menstabilkan harga minyak dunia.<sup>10</sup>

Sesuai dengan teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional suatu negara. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat bukanlah suatu hal yang mengejutkan, Amerika sebagai negara industri yang besar membutuhkan banyak energi dan sebagai negara kapitlis, Amerika juga selalu berkeinginan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang menjadi masalah adalah caranya dalam mencapai tujuan itu yang merugikan banyak pihak dan jauh dari aksi membela kemanusiaan seperti yang digembor-gemborkannya selama ini, karena dalam upayanya untuk mencapai kepentingannya, banyak jatuh korban dari pihak yang tidak bersalah seperti contohnya apa yang terjadi terhadap warga sipil Iran dan Afghanistan. Tapi, sepertinya pemerintah Amerika telah dibutakan oleh keinginannya untuk menguasai minyak karena sampai saat ini kecaman dunia internasional tidak mampu membendung langkah Amerika yang terkesan brutal dan arogan tersebut.

#### **3.2.1.2. Peristiwa 9/11**

*“America and our friends and allies join with all those who want peace and security in this word, and we stand together to win the war againts terrorism.”*

Itulah salah satu isi dari pidato dari George W. Bush pasca hancurnya menara kembar WTC pada tanggal 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Inti dari pidato tersebut adalah, Presiden Bush mengajak Amerika berikut sahabat dan aliansi mereka untuk bergabung dengan semua pihak yang menginginkan perdamaian dan keamanan di dunia ini dalam upaya melawan dan memenangkan peperangan terhadap terorisme.

---

<sup>10</sup> Austin, Andrew. “Di Balik Kebijakan Perang Bush di Asia Tengah dan Timur Tengah.” *The Bush Gang; Kelompok Elit yang Menghancurkan Serangan Neo-KOnservatif terhadap Demokrasi dan Keadilan*. Ed. Bernd Hamm. Terj., Lensi Mursida, PT. Ina Pubikatama Jakarta, 2006 hal. 88-89

Urusan mengganyang terorisme ini kemudian menjadi urusan bersama dunia. Tak pelak lagi, hampir seluruh kepala negara-kepala negara di dunia, termasuk penguasa di negeri-negeri Islam, tunduk pada tuntutan Amerika ini. Perang melawan ‘terorisme’, sejak saat itu telah menjadi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dominan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Amerika Serikat membentuk badan dan juga membuat undang-undang demi memperkuat pertahanan dalam negerinya. Seperti pembentukan badan Department of Homeland Security, pembuatan undang-undang yang dikenal dengan nama US Patriot Act, dan dikeluarkannya dokumen pertahanan Amerika yang lebih dikenal dengan nama US National Security Strategy, yang akan dijabarkan lebih mendetail berikut ini:

1. Department of Homeland Security (DHS)

Ketakutan Amerika Serikat terhadap teroris semakin menjadi-jadi setelah peristiwa 11 September 2001 yang menewaskan banyak warga Amerika dan menghancurkan simbol Amerika berupa menara kembar World Trade Center. Amerika sendiri bahkan menganggap peristiwa tersebut termasuk dalam kategori perang. Sepuluh hari setelah peristiwa tersebut, Presiden pada saat itu George W. Bush mengumumkan pembentukan suatu kantor yang disebut dengan Office of Homeland Security (OHS) tepatnya pada tanggal 21 September 2001. OHS memiliki fungsi sebagai koordinator dari kurang lebih 40 cabang pemerintah yang tugas utamanya adalah memerangi teroris. Pembentukan kantor yang didukung oleh para staf penasehat ini akan membuat Presiden melakukan tindakan yang lebih cepat tanpa harus mendapat persetujuan dari kongres. Untuk mendukung OHS, pada tanggal 6 Juni 2002, Bush mengusulkan pembentukan Department of Homeland Security (DHS) ke kongres Amerika Serikat. DHS akan menyatukan 22 cabang pemerintah di bawah satu departemen tunggal untuk melindungi bangsa dan wilayah Amerika dari ancaman dan serangan teroris internasional. DHS memiliki beberapa tugas pokok diantaranya: Melindungi wilayah perbatasan dan bandara-bandara, dan pelabuhan-pelabuhan, memonitor para pendatang asing ke Amerika, mengatur kesiapsiagaan dan membantu melatih serta melengkapi penanggap (responder) awal, memusatkan perhatian pada

ancaman bioterorisme dan WMD (senjata pemusnah massal), melakukan pelatihan-pelatihan regional, memetakan infrastruktur yang dianggap penting, menganalisis laporan intelijen keamanan domestik dari bermacam-macam sumber dan mengkomunikasikan ancaman-ancaman tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Apabila disimpulkan, DHS memiliki empat tugas pokok, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup> :

- 1) Melakukan penjagaan di setiap perbatasan dan pusat-pusat transportasi, dalam hal ini tugas pokok DHS adalah menjaga atau mencegah masuknya teroris ke wilayah Amerika Serikat. (*Border and Transportation Security - Control the borders and prevent terrorists and explosives from entering the country.*)
- 2) Bekerjasama dengan pihak keamanan lokal agar dapat memberi respon yang cepat untuk setiap keadaan darurat yang terjadi. (*Emergency Preparedness and Response - Work with state and local authorities to respond quickly and effectively to emergencies.*)
- 3) Bekerjasama dengan beberapa peneliti terbaik untuk mengembangkan suatu teknologi yang dapat mendeteksi adanya bahaya dari senjata kimia, biological, radiologi, ataupun nuklir agar dapat memberi perlindungan terbaik bagi warga Amerika. (*Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Countermeasures - Bring together the country's best scientists to develop technologies that detect biological, chemical, and nuclear weapons to best protect citizens.*)
- 4) Melakukan analisis untuk informasi-informasi yang masuk terutama yang berkaitan dengan informasi intelijen dari semua agensi pemerintahan yang tersebar di wilayah Amerika dan melakukan gambaran mengenai ancaman yang datang ke suatu wilayah negara Amerika. (*Information Analysis and Infrastructure Protection - Review intelligence and law enforcement information from all agencies of government, and produce a single daily picture of threats against the homeland.*)

---

<sup>11</sup> "Brief Documentary History of the Department of Homeland Security 2001–2008", [http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/brief\\_documentary\\_history\\_of\\_dhs\\_2001\\_2008.pdf](http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/brief_documentary_history_of_dhs_2001_2008.pdf) diakses pada 13 Nopember 2009

## 2. US Patriot Act

Ketakutan Amerika Serikat terhadap teroris semakin menjadi-jadi setelah peristiwa 11 September 2001 yang menewaskan banyak warga Amerika dan menghancurkan simbol Amerika berupa menara kembar World Trade Center. Amerika sendiri bahkan menganggap peristiwa tersebut termasuk dalam kategori perang. USA Patriot Act adalah Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (Senate and House of Representative) dan telah disahkan oleh Presiden Bush pada tanggal 25 Desember 2001. Undang-undang ini menyatakan dengan keras menentang terorisme, memberikan kekuasaan kepada polisi dan pihak intelijen untuk melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu demi memerangi terorisme dan mereka yang melindungi dan memberikan bantuan keuangan dan memburu, menyelidiki, dan mengentikan dan menahan serta mengadili teroris dari tindakan kejahatan kemanusiaan di Amerika Serikat. Presiden juga diberi wewenang untuk melakukan tindakan apabila negara Amerika diserang oleh negara lain atau orang asing lainnya.

USA Patriot Act adalah Undang-undang yang dikeluarkan atas persetujuan kongres untuk melegitimasi tindakan-tindakan aparat pemerintah untuk membasmi teroris internasional yang bergerak di dalam negeri Amerika. Undang-undang ini antara lain memberikan otoritas pada lembaga-lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen untuk melakukan tindakan seperti penyadapan komunikasi melalui telepon untuk tujuan keamanan nasional. Semua ini untuk mencegah para teroris yang memanfaatkan sistem liberal terbuka Amerika Serikat untuk melakukan tindakan kejahatan manusia dengan menyerang secara destruktif terhadap negara tersebut.

USA Patriot Act diperkuat lagi dengan adanya Doktrin Bush. Didalamnya mengandung Preemptive Action yang menetapkan serangan lebih awal terhadap sasaran-sasaran yang diperkirakan menhadi ancaman bagi keamanan nasional negara Amerika Serikat.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang USA Patriot Act, diantaranya<sup>12</sup>:

- 1) Memperbolehkan para penyelidik atau petugas hukum yang berwenang untuk menggunakan peralatan yang telah disediakan sebelumnya untuk beberapa kejahatan terorganisir seperti pengedaran obat-obatan terlarang. Peralatan yang dimaksud misalnya alat penyadap dan pelacak jejak, selain itu para penyelidik juga diberi wewenang untuk menelusuri catatan-catatan bisnis yang dulunya dianggap privasi seperti rekening Bank dan bon-bon pembelian dari toko-toko tertentu yang menjual peralatan yang dianggap dapat digunakan untuk merakit bom.
- 2) Dengan adanya Patriot Act, badan-badan penegak hukum di tiap wilayah Amerika Serikat dapat saling memberi informasi dan melakukan kerjasama. Semua badan penegak hukum dari petugas polisi biasa hingga agen FBI diwajibkan untuk saling bekerjasama karena bagi Patriot Act mereka semua berada pada kedudukan yang setara.
- 3) Patriot Act akan menyediakan peralatan berteknologi tinggi untuk melakukan pelacakan dan penyelidikan pada tiap gangguan atau ancaman yang dianggap mengarah kepada tindakan teroris. Peralatan yang dimaksud termasuk diantaranya adalah persenjataan dan alat-alat yang dapat digunakan untuk menunjang penyelidikan. Bahkan para penegak hukum dapat meminta bantuan para *hackers* yang dulunya merupakan musuh mereka untuk melacak *hackers* lain yang dicurigai terlibat dalam kegiatan teroris.
- 4) Patriot Act akan menambah hukuman bagi para pelaku teroris baik yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut maupun bagi pihak yang hanya membantu atau menyembunyikan keberadaan teroris. Bahkan kejahatan-kejahatan yang dulunya dianggap biasa (tidak berhubungan dengan kegiatan teroris) seperti secara sengaja membakar suatu tempat akan

---

<sup>12</sup> "What is the Patriot Act?",

[http://www.justice.gov/archive/ll/what\\_is\\_the\\_patriot\\_act.pdf](http://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf) diakses

pada 13 Nopember 2009

ditambah pula hukumannya. Pembelian bahan-bahan yang berbau kimia atau peralatan yang dicurigai dapat disalahgunakan untuk membuat bom juga diperketat sehingga tidak semua orang dapat membelinya secara sembarangan.

### 3. US National Security Strategy

Pasca serangan 9/11, Amerika Serikat mengevaluasi dan merumuskan kembali strategi keamanan nasionalnya dengan mengeluarkan dokumen The National Security Strategy of the USA (NSS) yang terbit pada 18 September 2002. Dalam dokumen tersebut konsep keamanan nasional mengalami perubahan yang besar dan mendasar dengan memasukkan konsep preemption yang terfokus pada kemungkinan serangan teroris dan penyebaran senjata pemusnah massal.

Konsep preemption sendiri mengandung arti inisiatif untuk melakukan aksi ofensif demi melumpuhkan kekuatan musuh sebelum musuh tersebut dapat menyerang<sup>13</sup>.

Tindakan Preemption sendiri tidak sepenuhnya tepat karena memiliki dampak atau bahaya seperti mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal serupa sehingga yang terjadi kemudian adalah ketidakamanan secara internasional. Selain itu kemungkinan terjadinya konflik akan lebih besar karena beberapa negara yang memang sedang dalam keadaan konflik atau sedang dalam keadaan hampir perang akan menganggap bahwa doktrin preemption yang dikobarkan Amerika Serikat sebagai pembenaran untuk menyerang negara lain terlebih dahulu dengan dalih bahwa negara tersebut mengancam keamanan negaranya. Sementara negara-negara yang termasuk

---

<sup>13</sup> O' Hanlon, Michael. E., Susan E. Rice, and James B. Steinberg, "The New National Security Strategy and Preemption," [http://www.brookings.edu/papers/2002/12terrorism\\_onhalon.aspx](http://www.brookings.edu/papers/2002/12terrorism_onhalon.aspx) diakses pada 09 Nopember 2009 pada pukul 20.57

ke dalam kategori mengancam kedaulatan Amerika dan dunia internasional, menurut NSS digolongkan sebagai *Rogue State*.

Kriteria-kriteria *Rogue State* berdasar US National Security Strategy adalah sebagai berikut:

- 1) Negara yang pemerintahannya bertindak opresif, brutal terhadap rakyatnya, serta mengeksploitasi sumber daya nasionalnya demi kepentingan penguasa.
- 2) Bersiap mengabaikan hukum internasional, mengancam negara-negara di sekitarnya.
- 3) Memiliki senjata pemusnah massal serta teknologi militer yang maju yang digunakan untuk mengancam, ofensif, atau mencapai tujuan agrefif rezim penguasa.
- 4) Menjadi sponsor terorisme yang bersifat global.
- 5) Menolak implementasi dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat.

Tragedi 11 September 2001 yang menewaskan ribuan orang di menara kembar WTC menjadi jalan bagi Amerika untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang agresif. Doktrin keamanan terbaru Amerika Serikat dijelaskan oleh NSS-2002 yang menggarisbawahi kebijakan Amerika secara menyeluruh. Apabila ditarik kesimpulan, isi dari NSS-2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa kesuksesan nasional hanya dapat diraih dengan cara menerapkan kebebasan, demokrasi, dan kebebasan dalam mendirikan suatu usaha. Bush berkeinginan untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai negara “Kiblat Ekonomi” seluruh bangsa di penjuru dunia ini. Dalam konteks NSS-2002 itu, setiap bangsa dan negara yang hendak memberlakukan pembatasan terhadap pengembangan perdagangan atau dengan kata lain suatu gerakan kapitalisasi internasional, maka akan dianggap sebagai pihak yang telah membahayakan keamanan nasional Amerika. Dan oleh sebab itu kekuatan



militer dan juga kekuatan ekonomi Amerika Serikat siap untuk melakukan penyerangan terhadap pihak yang dianggap membangkang tersebut.

- 2) Amerika Serikat menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk menyingkirkan ancaman-ancaman bagi keamanan nasionalnya dengan cara menggunakan kekuatan militer dan menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Konteks ancaman disini bisa berarti ancaman yang benar-benar nyata ataupun yang belum pasti. Apabila Amerika melakukan hal tersebut, dapat dipastikan yang terjadi kemudian dapat menempatkan perdamaian internasional dalam bahaya besar karena tindakan Bush bisa dikatakan telah melanggar kesepakatan-kesepakatan internasional. Selain itu tindakan tersebut dapat memicu perlawanan dari banyak pihak yang tidak terima begitu saja dengan tindakan semena-mena Bush, akibatnya Perang dapat dipastikan akan pecah.
- 3) Amerika Serikat akan menanggulangi masalah terorisme dengan cara melakukan pengembangan kekuatan militer secara besar-besaran. Oleh sebab itu Bush merasa perlu meningkatkan kemampuan teknologi militernya baik itu dengan cara mengembangkan sistem pertahanan rudal maupun melakukan uji coba kapabilitas senjata pemusnah massal.

Ada tiga hal penting yang patut disoroti dari Doktrin Bush atau dengan kata lain NSS-2002<sup>14</sup>:

- 1) Ambisi global Amerika untuk menjadi “Pemimpin Dunia” yang aktif dan didengar serta dipatuhi segala kehendaknya.
- 2) Amerika Serikat akan melakukan perubahan rezim di negara-negara yang dianggapnya tidak sehaluan karena dianggap membahayakan kepentingannya.
- 3) Memaksakan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang dianutnya ke seluruh penjuru dunia.

---

<sup>14</sup>Mahally, Abdul Halim, “Membongkar Ambisi Global AS”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.202

Namun sikap keras dan arogan Amerika Serikat ini tentu saja memiliki dampak buruk karena beberapa hal berikut ini<sup>15</sup>:

Pertama dengan sikapnya yang keras, Amerika Serikat tampaknya ingin melahirkan semacam struktur "bipolar" baru yang memperumit pola-pola hubungan antar negara. Pernyataan Presiden George W. Bush, "*either you are with us or you are with the terrorists*," secara hitam putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam sebuah pertarungan antara kekuatan baik (*good*) dan kekuatan jahat (*evil*). Pemilahan dunia demikian mempersulit posisi banyak negara, khususnya negara-negara pasca kolonial yang tidak ingin dipersepsikan oleh konstituennya berada dalam orbit Amerika Serikat. Lagipula, tampaknya sulit bagi Amerika Serikat untuk menerima pendapat negara-negara lain bahwa perang melawan terorisme tidak harus dilakukan dibawah pimpinan Amerika Serikat. Sementara itu bagi banyak negara berkembang, masalah kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan konflik antar-etnik dilihat lebih berbahaya ketimbang masalah terorisme sebagai ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka sebagai sebuah negara.

Kedua, tragedi 11 September juga telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang gunakan Amerika Serikat dalam menilai sebuah negara. Sekarang ini, Amerika Serikat cenderung lebih hirau kepada masalah terorisme ketimbang isyu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Kenyataan bahwa Presiden Pervez Musharraf di Pakistan naik ke panggung kekuasaan melalui kudeta militer, misalnya, tidak lagi menjadi penghalang bagi AS untuk menjalin aliansi anti-terorisme dengan negara itu. Dengan kata lain, AS tampaknya cenderung menjadikan "komitmen" melawan terorisme, ketimbang komitmen terhadap demokrasi dan HAM, sebagai alat menilai siapa lawan dan kawan. Akibatnya, telah terjadi pergeseran agenda global

---

<sup>15</sup> Sukma, Rizal, "Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi Global" [http://www.lfip.org/english/pdf/bali\\_seminar/Keamanan%20Intl%20-%20rizal%20sukma.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali_seminar/Keamanan%20Intl%20-%20rizal%20sukma.pdf) 13 Nov 2009, 22.55

dari demokrasi dan HAM menjadi perang khususnya terorisme yang dianggap mengancam kepentingan dan keamanan Amerika Serikat secara langsung.

Ketiga, ditambah dengan adanya kecenderungan yang mengaitkan Islam dengan terorisme di kalangan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, tatanan politik global semakin diperumit oleh ketegangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Islam ataupun negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Kehati-hatian dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam merespon persoalan terorisme ini kerap menimbulkan kecurigaan dari Amerika Serikat, dan bahkan tidak jarang melahirkan tekanan-tekanan politik yang tidak mudah untuk dihadapi. Akibatnya, pemerintah di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim kerap dihadapkan kepada dilema antara "kewajiban" memberantas terorisme di satu pihak dan keharusan untuk menjaga hak-hak konstituen domestik di lain pihak. Dengan kata lain, kebijakan "perang terhadap terorisme" yang dijalankan Amerika Serikat telah menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok-kelompok Islam di banyak negara Muslim. Sampai sekarang, Amerika Serikat tampaknya masih mengalami kesulitan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan "perang melawan terorisme" yang tidak menimbulkan komplikasi dalam hubungannya dengan Dunia Islam.

Keempat, untuk mengantisipasi kemungkinan serangan-serangan teroris di masa depan, Amerika Serikat juga telah mengadopsi sebuah doktrin baru, yakni doktrin *preemption*. Melalui doktrin ini, Amerika Serikat secara sepihak memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, khususnya melalui tindakan militer unilateral, untuk menghancurkan apa yang dipersepsikannya sebagai kemungkinan ancaman teror terhadap kepentingan Amerika Serikat di mana saja. Doktrin *preemption* tersebut jelas meresahkan banyak negara, dan dapat mengubah tatanan, nilai dan norma-norma hubungan antarnegara secara fundamental. Dalam konteks doktrin *preemption* dan kecenderungan unilateralis itu, prinsip kedaulatan negara, arti penting dan peran institusi-institusi multilateral seperti PBB dan

organisasi regional, serta ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat saja diabaikan. Dengan kata lain, unilateralisme Amerika Serikat, yang didukung dengan kekuatan ekonomi dan militer yang tidak tertandingi, akan menjadi faktor penentu yang sangat dominan bagi tatanan politik global di waktu mendatang.

*Kelima*, Amerika Serikat kini tampil sebagai negara adidaya tunggal yang sangat yakin bahwa pendekatan militer merupakan pendekatan terbaik dalam memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingan keamanannya. Aksi serangan militer ke Afghanistan, dan invasi ke Irak, merupakan contoh nyata dari keyakinan demikian. Penekanan kepada pendekatan militer itu terlihat juga melalui peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan sejak 11 September, peran Pentagon yang dominan dalam menjalankan kebijakan luar negeri, dan peningkatan bantuan militer kepada pemerintah di negara-negara yang diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi mitra dalam perang melawan terorisme, seperti Pakistan, Filipina, dan negara lainnya di Timur Tengah. Kecenderungan demikian juga terlihat dalam upayanya membangun koalisi internasional melawan terorisme, dimana AS tidak segan-segan mengucurkan dana milyaran dolar untuk memperkuat hubungan militer dengan negara-negara yang diharapkan dapat menjadi mitra dalam perang terhadap terorisme. Bagi AS, upaya untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang dituduh menjadi organisasi teroris tampaknya jauh lebih penting ketimbang mencari dan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya terorisme itu sendiri.

### **3.2.2. Faktor Eksternal**

#### **3.2.2.1. Kepentingan Israel**

Apabila membicarakan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, pasti akan sulit apabila kita tidak membahas juga mengenai Israel. Bukanlah sebuah rahasia lagi kalau Israel merupakan sekutu setia Amerika Serikat atau justru malah kebalikannya, Amerika Serikatlah yang merupakan sekutu setia Israel.

Negara Israel diproklamkan pendiriannya pada tanggal 14 Mei 1948 setelah menumpahkan banyak darah dari bangsa Palestina. Israel merupakan negara yang mengusung prinsip demokrasi. Setelah terbentuk negara Israel, pada 14 Februari 1949 pertama kalinya dibentuk *Knesset* (Majelis) sebagai sebuah parlemen satu kamar yang para anggotanya dipilih oleh rakyat. Salah satu tugas *Knesset* adalah memilih Presiden atau kepala negara untuk masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali. Namun sebagai konsekuensi dari sistem parlementer, jabatan Presiden hanyalah seremonial. Kekuasaan politiknya sangat terbatas. Kekuasaan politik yang sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan yang biasanya dijabat oleh pemimpin partai terbesar.<sup>16</sup>

Di Amerika, Yahudi juga menanamkan hegemoninya begitu dalam. Seluruh kegiatan politik amerika baik di dalam maupun di luar akan dipantau secara langsung oleh lembaga lobi yahudi yaitu AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Lembaga resmi ini didirikan tahun 1950-an. Kelompok lobi ini, dibangun oleh komunitas Yahudi Amerika untuk menjaga kepentingan Israel. AIPAC memiliki lima atau enam pelobi resmi di Kongres dengan staf berjumlah 150 orang, dengan dukungan budget tahunan sebesar 15 juta dollar. Dana yang antara lain mereka kumpulkan dengan cara “memeras” diaspora Yahudi yang tinggal di Amerika. Mengeksploitasi perasaan bersalah para diaspora yang dianggap hidup enak di negeri orang, sementara saudaranya yang tinggal di Israel setiap hari harus berhadapan dengan intifada atau bom bunuh diri dari kelompok pejuang Palestina<sup>17</sup>.

Selain AIPAC, masih ada Conference of Presidents of Major Jewish Organizations (CPMJO). Menurut riset National Journal pada Maret 2005 dan Forbes pada 1997, dalam hal melobi Washington, AIPAC hanya kalah oleh Asosiasi Pensiunan Amerika Serikat. Mereka didukung tokoh-tokoh terkemuka Kristen Evangelis seperti Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson

---

<sup>16</sup> Sihbudi, Riza, hal.315

<sup>17</sup> Supriyadi, S.Si, “Antara Obama, Israel, dan Konflik Timur Tengah”, <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/antara-obama-israel-dan-konflik-timur-tengah.htm> diakses pada 2 Nopember 2009

yang bernaung di bawah bendera The American Alliance of Jews and Christians (AAJC). Kelompok ini muncul pada Juli 2002 dipimpin Bauer dan Rabi Daniel Lapin. Kuatnya lobi Israel di Amerika telah berhasil memaksa Amerika untuk membarikan bantuan sebesar 3 miliar dolar per tahun pada Israel. Bantuan ini merupakan seperlima bantuan luar negeri Amerika. Selain soal dana, dukungan Amerika juga diaplikasikan pada PBB. Tercatat sejak tahun 1972 sampai tahun 2006, sudah 66 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi Israel di Palestina di veto Amerika. Ini belum termasuk resolusi setelah tahun tersebut plus resolusi terakhir saat Israel melancarkan agresinya di Gaza<sup>18</sup>.

Media massa Amerika Serikat merupakan alat yang sangat berperan bagi kaum Yahudi dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh Gedung Putih. Orang-orang Yahudi tidak hanya menguasai jaringan media massa di Amerika Serikat, melainkan juga jaringan media massa yang menguasai arus informasi di berbagai penjuru dunia. Dewasa ini, sekitar 80 persen jaringan media massa Amerika Serikat dikuasai oleh kaum Yahudi.

Media-media massa di bawah kontrol orang-orang Yahudi di Amerika Serikat melakukan rekayasa informasi dan opini demi menggiring para pengambil keputusan di Gedung Putih untuk memiliki opini sebagaimana yang dikehendaki oleh Yahudi. Opini itulah yang kemudian akan berperan dalam berbagai pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui media massa pula, Yahudi mengangkat pamor tokoh-tokoh politik Amerika Serikat agar mendapat banyak suara dalam pemilu, atau sebaliknya menjatuhkan tokoh-tokoh politik yang tidak disukainya agar gagal dalam pemilu.

Melalui cara itu, tak heran bila para politisi Amerika Serikat sangat bergantung kepada lobi-lobi Yahudi. Dalam pemilu Kongres misalnya, para senator yang ingin meraih kursi berlomba-lomba untuk mencari dukungan dari organisasi-organisasi Yahudi. Dukungan yang diberikan oleh kaum Yahudi dalam hal ini antara lain berupa dana untuk kampanye serta propaganda media massa. Sebagai imbalannya, ketika telah terpilih, para senator itu harus mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada Rezim Yahudi.

---

<sup>18</sup> ibid

Sementara itu, usaha untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri AS secara langsung dilakukan orang-orang Yahudi dengan cara menginfiltrasi pemerintah, Kongres, dan Dewan Tinggi Amerika Serikat. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Amerika Serikat karena mereka menguasai sumber-sumber keuangan dan ekonomi negara itu. Berbagai bank besar dan perusahaan raksasa di Amerika Serikat dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Berdasarkan data, 20 persen dari milyader Amerika Serikat adalah orang-orang Yahudi, padahal populasi orang Yahudi di Amerika Serikat hanya 3 persen<sup>19</sup>. Dengan kondisi ini, tak heran bila kaum Yahudi dengan sebuah program meluas yang terencana, mampu menggunakan segala cara untuk menekan pemerintah Amerika Serikat agar menetapkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan kaum Yahudi.

Di dalam negeri Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negeri, para pejabat terkait khususnya Presiden selalu berpegang teguh pada doktrin *Israel First*, yang menjadi dasar utama kebijakan luar negeri Amerika khusus untuk kawasan Timur Tengah yang fungsinya tidak lain dan tidak bukan untuk mendukung dan melindungi kepentingan Israel. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika Presiden Clinton menjatuhkan veto terhadap rancangan resolusi DKK PBB yang mengecam Israel. Alasan Amerika pada saat itu adalah karena resolusi DKK PBB tersebut tidak sejalan dengan prinsip perdamaian Timur Tengah, dimana proses perdamaian agar sepenuhnya dilakukan secara langsung oleh Arab dan Israel tanpa campur tangan dari DKK PBB.

Pada masa pemerintahan Bush, kebijakan luar negeri Amerika tetap masih berpihak pada Israel. Contoh paling konkret adalah ketika Presiden Bush memutuskan untuk menyerang Irak dengan alasan negara Saddam tersebut menyembunyikan senjata pemusnah massal dan mengancam kedamaian internasional. Padahal yang sesungguhnya adalah ambisi Bush untuk melucuti senjata Irak dengan maksud mengeliminasi ancaman militer Arab terhadap Israel,

---

<sup>19</sup>"Peran Zionis Dalam Kebijakan Luar Negeri AS"

[http://swaramuslim.com/more.php?id=A5187\\_0\\_1\\_0\\_M](http://swaramuslim.com/more.php?id=A5187_0_1_0_M) diakses pada 4

November 2009

karena Irak adalah satu-satunya negara Arab yang pernah menyerang Israel dengan rudal Scud sewaktu berlangsung Perang Teluk pada tahun 1991. Amerika tidak akan membiarkan negara Arab manapun memiliki kekuatan militer yang menyamai apalagi melebihi Israel. Selain itu ambisi lain Bush di balik penyerangannya terhadap Irak adalah faktor ekonomi, yaitu untuk menguasai sumber daya minyak negara tersebut. Irak memang sebuah negara yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar di dunia setelah negara Arab Saudi, oleh sebab itu tidaklah heran Amerika sebagai negara yang memboroskan banyak energi ingin menguasai Irak.

Masih banyak lagi kebijakan Amerika Serikat yang jelas-jelas memperlihatkan dukungannya yang begitu besar terhadap Israel. Bahkan dalam konflik antara Israel dan Palestina, Amerika terlihat begitu jelas bersikap berat sebelah alias tidak adil dalam menghadapi kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina. Beribu-ribu nyawa tak berdosa dari rakyat Palestina melayang akibat tindakan Israel yang membabi buta, namun sampai saat ini Amerika bahkan sedikitpun tidak mengecam tindakan Israel tersebut bahkan dengan dalih bahwa tindakan Israel adalah untuk membela diri dan sebagai salah satu upaya untuk menghancurkan sarang teroris, Amerika membela kekejaman sekutunya tersebut. Lain soalnya apabila rakyat Palestina yang mengadakan perlawanan atau serangan balik terhadap tentara Israel, tindakan tersebut malah kemudian dituding sebagai aksi terorisme dan anarkis.

### **3.2.2.2. Kebangkitan Politik Islam di Timur Tengah**

Pada tahun 2000-an ini, Islam mencapai kebangkitannya dalam perpolitikan di kawasan Timur Tengah. Hal itu dapat dilihat dari menangnya tokoh yang dianggap merupakan dari haluan “garis keras” Mahmoud Ahmadinejad yang berhasil memenangkan pemilu di Iran pada Juni 2005. Dan di Irak sendiri yang masih berada dalam pengawasan ketat Amerika Serikat, aliansi partai-partai politik Syiah yang dianggap “pro-Iran” berhasil meraih suara terbesar (48%) dalam pemilu parlemen di Irak yang berlangsung pada Desember 2005. Di Mesir pun fenomena ini tidak kalah menarik, hal itu ditunjukkan dari berhasilnya para anggota kelompok Islam Ikhwanul Muslimin dalam merebut 20% suara dalam



pemilu parlemen yang berlangsung pada Desember 2005 dan perolehan tersebut dua kali lipat dibanding pemilu sebelumnya. Di Palestina kebangkitan politik Islam dibuktikan dengan keberhasilan Partai Islam Hamas meraih kemenangan mutlak pada Januari 2006, partai tersebut berhasil mendapatkan 76 kursi dari 132 kursi yang ada.

Fenomena tersebut tentunya mendapat sambutan antusias dari sebagian besar masyarakat di negara-negara muslim, namun pemerintahan negara Barat (Amerika Serikat dan para sekutunya) memandang fenomena ini sebagai sebuah ancaman. Memang seperti yang sudah dijabarkan pada sub-bab terdahulu, bahwa Amerika Serikat sejak peristiwa 9/11 mengobarkan perang terhadap teroris dan mengajak seluruh dunia untuk ikut dalam upayanya tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah Bush sepertinya menudingkan tuduhan hanya kepada kaum muslim hal itu dapat dibuktikan dari tokoh-tokoh Islam yang dianggap menjadi pelaku teroris dari Osama Bin Laden, para pengikut jaringan Al-Qaeda, Al-Zawahiri, dan lain-lain. Oleh sebab itu perang melawan teroris yang digembargemborkan Bush dianggap oleh sebagian besar kalangan muslim sebagai perang melawan mereka. Hal tersebut makin diperparah dengan ulah Amerika yang kemudian menyerang Irak dan Afghanistan yang bagi pemerintahan Bush dianggap sebagai salah satu cara dalam upaya mereka memerangi terorisme.

Sebenarnya, pandangan bahwa 'Islam fundamentalis' atau 'Islam militan' merupakan salah satu ancaman terhadap Barat telah muncul sejak hampir dua dekade silam. Panggilan Ayatullah Khomeini terhadap Amerika Serikat sebagai *The Great Satan*, serta seruan Saddam Hussein untuk berjihad melawan kaum kafir asing telah memperkuat citra Islam sebagai agama militan, ekspansionis, sangat anti-Amerika, dan bermaksud untuk berperang melawan Barat. Oleh sebab itu timbul kecurigaan antara para warga Barat terhadap kaum muslim di seluruh dunia. Mereka memandang Muslim sebagai perang suci berlatar kebencian, kaum yang fanatisme dan suka kekerasan, tidak mempunyai toleransi, serta menekan kaum wanita.

Sementara itu, di mata kebanyakan kekuatan politik Islam di Timur Tengah dan di Dunia Muslim pada umumnya, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya tidak hanya dilihat sebagai penopang utama kekuasaan rezim-rezim sekuler yang

korup dan menindas, melainkan juga diidentikkan dengan kaum Zionis-Israel yang menjadi musuh bersama kekuatan politik Islam.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, bagi kekuatan politik Islam di kawasan Timur Tengah perjuangan demokrasi sekaligus juga memiliki makna sebagai sebuah perjuangan melawan hegemoni dan dominasi politik Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel.

Sebenarnya kalangan Barat sudah sejak lama memendam kecurigaan dan memandang kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang rawan konflik, dan karena mayoritas penduduknya adalah penganut Islam, maka timbul semacam pandangan bahwa kaum Muslim menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah karena dianggap kekerasan sebagai salah satu jihad. Padahal ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang rawan konflik, diantaranya<sup>21</sup>:

1. Berkaitan dengan karakter budaya yang sulit dilepaskan dari faktor lingkungan alam (padang pasir yang gersang dan panas). Karenanya temperamen yang tinggi menjadi salah satu ciri mereka yang paling menonjol.
2. Faktor kekayaan alam (minyak) yang melimpah menjadi daya tarik bagi kekuatan-kekuatan ekstra regional (luar kawasan) untuk cenderung melakukan intervensi dalam setiap persoalan internal yang muncul. Dengan kata lain, potensi ekonomi yang dimiliki Timur Tengah menjadikan kawasan ini hampir mustahil untuk bisa lepas dari kepentingan politik pihak-pihak luar, terutama negara-negara Barat dan lebih khusus lagi Amerika Serikat. Ini berkaitan erat dengan fakta bahwa belum ditemukannya sumber energi alternatif bagi proses industri Barat, di satu sisi dan ketergantungan (sebagian) negara-negara Timur Tengah terhadap teknologi Barat, di sisi lain.
3. Kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi semakin besar dengan keberadaan Israel. Amerika tidak hanya memandang

---

<sup>20</sup> Sihbudi, Riza, "Dinamika dan Kecenderungan Politik Islam di Timur Tengah dan Dunia Muslim", Jurnal Politika Volume 2, No.1, tahun 2006

<sup>21</sup> Sihbudi, Riza, "Menyandera Timur Tengah", Mizan, 2007, hal.xxxiii

Israel sebagai “wakil” Barat di kawasan ini, namun juga berkaitan dengan kenyataan adanya dominasi ekonomi-politik etnik Yahudi di Amerika Serikat. Karena itu, tidaklah terlalu mengherankan jika dalam media massa Amerika, misalnya Arab acapkali dikaitkan dengan terorisme sementara Israel disanjung sebagai “panji-panji demokrasi”. Oleh sebab itu bisa dipahami pula jika Amerika senantiasa tidak berdaya mengatasi sikap keras elite politik Israel yang seringkali melanggar hukum internasional.

Selain itu, kebangkitan politik Islam di kawasan Timur Tengah dianggap kaum Barat sebagai kebangkitan dari fenomena “fundamentalisme” Islam. Istilah “fundamentalisme” sendiri memang terkesan negatif karena banyak dipakai oleh kalangan akademisi maupun media massa untuk merujuk gerakan-gerakan Islam yang bersifat radikal, ekstrem, dan militan serta tidak lupa sebagai gerakan “anti Barat/Amerika”. Namun kini yang menjadi masalah adalah, kaum Barat menyamaratakan semua kelompok Muslim sebagai penganut Islam “fundamentalisme”. Hal itu diperparah dengan kejadian 9/11 dimana Bush menuding kaum Muslimlah sebagai otak di belakang peristiwa tersebut sehingga Islam kemudian identik dengan terorisme dan oleh sebab itu harus dibasmi. Jadi ketika, politik Islam mengalami kebangkitan, Bush dan para sekutunya berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu tanda perlawanan negara tersebut terhadap hegemoni Amerika dan dapat menghambat Amerika dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

### **3.3. Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Nuklir**

Menurut Mantan Menlu Amerika Serikat, Henry Kissinger, setidaknya ada tiga alasan yang mendorong beberapa negara untuk mendapatkan senjata nuklir<sup>22</sup>:

1. Keinginan untuk menjadi sebuah kekuatan dunia didasarkan pada kepercayaan bahwa suatu negara tidak mampu mempertahankan dirinya

---

<sup>22</sup> diambil dari artikel berjudul “India Dapat Pas Jalan Nuklir” dari surat kabar “Bisnis Indonesia” terbitan tanggal 6 Maret 2006

sendiri melawan berbagai bahaya yang mengancam upaya untuk menjadi kekuatan dunia. India termasuk dalam kategori ini.

2. Negara yang merasa terancam oleh negara tetangga dengan populasi atau sumber daya yang lebih besar, dapat dilihat dari peralatan senjata nuklir, bersikap tidak dapat menerima risiko atau membuat alat pencegahan melawan berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Israel dan Pakistan termasuk dalam kategori ini.
3. Adalah negara-negara yang tekun merusak keseimbangan kekuatan di kawasan mereka dan melihat persenjataan nuklir sebagai sebuah alat untuk mengintimidasi tetangga mereka dan sebagai bentuk intervensi dari luar untuk mengecilkan hati. Irak dan Korea masuk ke dalam kategori ini.

Untuk kebijakan mengenai senjata nuklir sendiri, terdapat empat kategori diantaranya yaitu sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Declaratory Policy, pernyataan publik yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa Amerika Serikat memiliki senjata nuklir, bagaimana mereka akan menggunakannya dan usaha-usaha apa yang akan mereka lakukan untuk mengurangi bahaya senjata tersebut.
2. Acquisition Policy, kebijakan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan produksi sistem senjata nuklir.
3. Employment Policy, berhubungan dengan bagaimana senjata nuklir akan digunakan
4. Deployment Policy, berkaitan erat dengan Employment Policy dan berhubungan dengan dimana kekuatan nuklir tersebut ditempatkan.

Untuk negara Amerika Serikat sendiri, pada dasarnya kebijakan luar negeri dalam bidang nuklir selain melarang setiap negara untuk melakukan penyebarluasan senjata nuklir, juga akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang melanggar pelarangan penyebarluasan senjata nuklir tersebut. Kebijakan nuklir

---

<sup>23</sup> Nuclear Weapon Policy, <http://nrdc.org/nuclear/nuguide/nwipoli.asp>

Amerika Serikat tersebut terlihat berstandar ganda. Hal tersebut terlihat ketika pemerintah Amerika Serikat membantu Pemerintah India dalam mengembangkan teknologi nuklirnya, yang memungkinkan terjadinya pengembangan senjata nuklir. Sedangkan dalam kasus nuklir Iran, pemerintah Amerika Serikat menolak semua program nuklir yang dikembangkan oleh pemerintah Iran tersebut<sup>24</sup>.

Sementara hubungan antara Amerika Serikat dan Pakistan mengalami perbaikan, awalnya Amerika memberikan reaksi yang dingin terhadap negara tersebut terutama pada masa awal pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf yang mulai berkuasa pada tahun 1999. Namun setelah Pakistan menyatakan kesediaannya untuk mendukung Amerika Serikat dalam perang melawan teroris dan kembalinya Pakistan pada dasar-dasar demokrasi, menyebabkan Amerika Serikat membatalkan banyak sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan dan pemberian banyak bantuan ekonomi, dan terjalinnya kerjasama militer antar kedua negara tersebut. Bahkan kemudian Amerika memberikan dukungannya terhadap program nuklir negara tersebut tanpa melontarkan kecurigaan bahwa Pakistan mengembangkan nuklir untuk digunakan sebagai persenjataan.

Selain itu Amerika Serikat juga memberikan dukungannya terhadap program nuklir Israel yang padahal jelas-jelas memiliki berbagai kemampuan senjata pemusnah dan kemampuan senjata mereka termasuk yang termodern di kawasan Timur Tengah. Israel dianggap sebagai negara pertama yang memiliki reaktor nuklir di kawasan Timur Tengah bahkan Israel merupakan negara yang memasukkan teknologi nuklir di kawasan ini. Bahkan tidak hanya itu, ada sejumlah sumber yang menyebutkan bahwa Israel adalah negara pertama yang menggunakan senjata biologi di kawasan Timur Tengah yang digunakan pada tahun 1947 ketika perang antara Arab dan Israel terjadi untuk pertama kalinya. Pada saat itu Israel melakukan pencemaran pada sumber-sumber air di Palestina.

Pada masa pemerintahan Clinton, Amerika Serikat banyak terlibat dengan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan pengurangan penggunaan nuklir. Salah satu traktat penting yang ditandatangani Presiden Clinton adalah traktat

---

<sup>24</sup>America's Misguided Nuclear Strategy,

<http://www.iht.com/articles/2006/03/07/opinion/edlevi.php>

yang menyatakan bahwa kawasan Afrika sebagai zona bebas nuklir dan pada 1996 Clinton juga mendatangi traktat yang melarang adanya uji coba nuklir<sup>25</sup>.

Sementara pada masa pemerintahan Bush, kebijakan nuklir terlihat jelas dengan banyak dilontarkannya tuduhan terhadap Iran mengenai program nuklirnya yang dianggap Amerika sebagai program pengembangan senjata bukan diperuntukkan sebagai sumber energi. Selain itu sejak peristiwa kelabu 11 September 2001, kebijakan nuklir Amerika Serikat berkaitan erat dengan permasalahan yang teroris.

Amerika juga menuding beberapa negara Islam seperti Irak, Afghanistan, dan Iran sebagai sarang teroris. Oleh sebab itu sebagai upaya Amerika dalam memerangi teroris dan dengan mengumandangkan kebijakan *preemptive strategy* dimana lebih baik melakukan serangan sebelum diserang, Amerika menyerang Irak dan Afghanistan. Alasan Amerika menyerang Afghanistan dimaksudkan untuk menghancurkan kekuatan Al-Qaeda dan rezim Taliban. Operasi militer itu juga secara tidak langsung mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, serta didukung penuh oleh sekutu-sekutu utama AS, negara-negara besar serta negara-negara garis depan lainnya seperti Pakistan.

Sementara alasan Amerika menyerang Irak yang menjadi sumber kontroversi dan menimbulkan sejumlah persoalan serius dalam tatanan internasional karena penyerangan tersebut walaupun dengan embel-embel untuk menghancurkan senjata pemusnah massal yang disembunyikan rezim Sadam Hussein, namun pada kenyataannya aksi tersebut lebih berupa pendudukan dan penundukan ketimbang hanya sekedar perubahan rezim dan pencarian senjata pemusnah massal yang hingga kini tidak terbukti keberadaannya.

Penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak, memunculkan banyak hal yang semakin mempertegas betapa arogannya Amerika Serikat dan betapa kebijakan

---

<sup>25</sup> Caruson, Kiki and Victoria A. Farrar-Myers, "Promoting President's Foreign Policy Agenda: Presidential Use of Executive Agreements as Policy Vehicles", *Political Research Quarterly* vol.60, No.4 (Dec 2007) <http://www.jstor.org/stable/4623862> diakses pada 17/09/2009 14.27

luar negerinya bersifat unilateralisme, hal tersebut dibuktikan dari lima aspek penting yang dapat dicermati dari invasi Amerika Serikat ke Irak, diantaranya<sup>26</sup>:

Pertama, serangan Amerika Serikat ke Irak menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai yang mengatur hubungan antar negara. Perang hanya didasarkan atas dugaan-dugaan dan asumsi mengenai kemungkinan adanya ancaman terhadap keamanan internasional dan kepentingan keamanan Amerika Serikat. Tujuan dari serangan itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas. Tujuan ataupun alasan yang digunakan Amerika Serikat kerap berubah-ubah, mulai dari untuk menghancurkan senjata pemusnah masal (yang ternyata sampai sekarang belum terbukti), untuk mengganti rezim Presiden Saddam Hussein, memerangi terorisme sampai untuk “membebaskan” rakyat Irak dari tirani kekuasaan despotik pemerintah Saddam Hussein. Bahkan, yang lebih mengundang kontroversi adalah, serangan ke Irak itu sama sekali tidak mengabaikan posisi Dewan Keamanan, yang meskipun tidak sempurna, sebagai pemikul tanggungjawab akhir dari ketertiban global (*the last bastion of global order*).

Kedua, invasi Amerika Serikat ke Irak merupakan "pameran" kekuatan militer dan teknologi perang yang belum ada tandingannya. Meskipun "pameran" itu sebelumnya telah diperlihatkan dalam perang di Afghanistan, invasi ke Irak memiliki nilai tersendiri bagi Amerika Serikat dalam menunjukkan supremasi militernya kepada dunia internasional. Berbeda dengan Afghanistan yang tidak memiliki angkatan bersenjata modern, Irak termasuk salah satu kekuatan militer yang diperhitungkan dalam percaturan politik dan geo-politik di Timur Tengah. Oleh karena itu, keberhasilan pasukan Amerika Serikat menguasai Irak dalam waktu yang relatif singkat telah mempertegas posisi negara itu sebagai adidaya tunggal (*the only superpower*). Disamping itu, invasi ke Irak tidak lain adalah bukti dari kembalinya *power politics* sebagai paradigma hubungan internasional.

---

<sup>26</sup> Sukma, Rizal, "Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi Global" [http://www.lfip.org/english/pdf/bali\\_seminar/Keamanan%20Intl%20-%20Rizal%20sukma.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali_seminar/Keamanan%20Intl%20-%20Rizal%20sukma.pdf) 13 Nov 2009, 22.55

Ketiga, keputusan sepihak Amerika Serikat untuk menyerang Irak tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB juga memperlihatkan kecenderungan arogansi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kecenderungan itu terlihat dari sikap Amerika Serikat yang cenderung memaksa, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, merasa benar sendiri, dan tidak dapat menerima ada pihak-pihak yang menentang keputusannya untuk menyerang Irak secara unilateral. Ketegangan dalam hubungan Amerika Serikat dengan Perancis, Jerman, dan Rusia, misalnya, disebabkan oleh sikap Amerika Serikat yang dinilai banyak pihak sebagai sikap arogan tersebut. Bahkan, pemerintah AS cenderung melihat PBB sebagai sebuah institusi yang tidak terlalu bermanfaat dan menjadi penghambat yang menjengkelkan. Ironisnya, sikap tidak menentang yang banyak diperlihatkan oleh sekutu dan mitra-mitranya yang lain dilihat sebagai dukungan bagi kebijakannya di Irak.

Keempat, invasi Amerika Serikat ke Irak jelas merusak kredibilitas negara itu sebagai negara yang kerap dijadikan model bagi negara-negara lain dalam hal demokrasi. Invasi ke Irak, apabila dibandingkan dengan sikapnya terhadap Israel dan juga terhadap Korea Utara, jelas menimbulkan kritik mengenai adanya sikap standar ganda dalam kebijakan Amerika Serikat. Bahkan, sulit rasanya menerima kenyataan bahwa Amerika Serikat, yang diharapkan banyak pihak untuk bersikap dan bertindak sebagaimana lazimnya sebuah negara besar, pada akhirnya dengan mudah memilih jalan kekerasan dan perang ketimbang memberi kesempatan kepada dialog dan perundingan dalam menyelesaikan sebuah krisis internasional. Sikap kekanak-kanakan sebagian kalangan dalam pemerintah Amerika Serikat dalam merespon perbedaan pendapat dengan Perancis juga dapat dijadikan ukuran bagi melemahnya kredibilitas negara itu sebagai pendukung demokrasi. Lemahnya kredibilitas Amerika Serikat sebagai penganjur demokrasi ini jelas mempersulit negara-negara yang sedang berada dalam proses transisi demokrasi ketika kekuatan pro-demokrasi harus berhadapan dengan kekuatan antidemokrasi di dalam negeri. Bahkan, seperti yang telah disinggung sebelumnya, terdapat kesan dan kecenderungan bahwa demokrasi dan HAM tidak lagi menjadi *defining framework* bagi pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden George W. Bush dalam mengelola hubungan luar negerinya.



Kelima, dengan dicanangkannya “perang melawan terorisme” oleh Amerika Serikat, terbuka pula peluang bagi perubahan fundamental dalam hubungan antar negara besar (*major powers*). Rusia dan Cina misalnya, kini seolah menemukan sebuah “perekat” baru untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Nada kerjasama tampaknya kini menjadi tema dominan dalam hubungan di antara mereka. Semua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, misalnya, menyatakan dukungan penuh terhadap serangan Amerika Serikat di Afghanistan. Di samping itu, dengan ikut serta dalam memerangi terorisme, Jepang dan Jerman mendapat kesempatan untuk segera menjadi negara “normal.” Respon Jepang yang untuk pertama kalinya mengirimkan peralatan perangnya ke Afghanistan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat dilihat banyak pihak sebagai langkah awal ke arah demikian. Ketidaksetujuan Perancis, Jerman, Rusia, dan Cina terhadap invasi ke Irak terbukti tidak menimbulkan kerusakan dan ketegangan serius dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Dengan kata lain “perang melawan terorisme” menjadi faktor dasar bagi terjadinya penyesuaian-penyesuaian (*realignment*) dalam hubungan antar-negara besar, yang lebih ditandai oleh kemauan kompromi ketimbang konfrontasi. Dengan demikian, masyarakat internasional akan dihadapkan kepada sebuah realita yang tidak menyenangkan, dimana tatanan global di masa mendatang akan lebih ditemukan oleh kepentingan dan kompromi-kompromi di antara negara besar.

#### **3.4. Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Program Nuklir Iran**

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat tidak mengalami banyak perubahan baik pada masa pemerintahan Clinton maupun Bush. Hubungan antara kedua negara tersebut tetap saja memanas dan bahkan cenderung memburuk dikarenakan beberapa peristiwa yang menimbulkan banyak prasangka pada kedua belah pihak.

Konflik antara Iran dan Amerika memang bukanlah hal yang baru, semua berawal dari tergulingnya Dinasti Pahlevi pada tahun 1979 yang lebih dikenal dengan peristiwa Revolusi Islam di Iran. Pada saat itu Amerika merasa ‘dipermalukan’ karena peristiwa tersebut menyebabkan Amerika Serikat kehilangan sekutu dan basis utamanya di kawasan Teluk. Pada saat Pahlevi memimpin, Iran memang

tergantung pada Amerika bahkan banyak kebijakan Iran yang pro-Barat. Selain itu ada peristiwa lain yang menyebabkan Amerika merasa ‘dipermalukan’ yaitu kegagalan pemerintahan Jimmy Carter yang berkuasa pada saat itu dalam upaya membebaskan sekitar 50 diplomat mereka yang disandera di Kedubes Amerika Serikat di Teheran, peristiwa itu terjadi pada tahun 1980. Kemudian ada satu lagi peristiwa yang disebut dengan *Irangate* dimana terbongkarnya skandal penjualan senjata dari Amerika Serikat ke Iran secara rahasia yang keuntungannya disumbangkan pada para pemberontak Contra di Nikaragua, skandal tersebut hampir saja menyeret Presiden Amerika Serikat yang berkuasa pada saat itu, Ronald Reagan ke pengadilan.

Semenjak berkuasanya kaum mullah di Iran, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran tidak lagi terjalin. Namun hubungan ekonomi tetap ada karena Amerika Serikat merupakan pembeli minyak Iran terbesar ketiga setelah Jepang dan Jerman. Hubungan politik mulai menampakkan tanda-tanda perbaikan ketika Rafsanjani terpilih menjadi presiden Iran dari tahun 1988 hingga 1997, terutama ketika Iran memutuskan untuk berada dalam posisi netral dalam Perang Teluk namun tak berapa lama kemudian hubungan kembali memanas ketika Iran menolah kehadiran militer Amerika Serikat dan sebaliknya Amerika Serikat menolak keinginan Iran untuk ikutserta dalam mengatur keamanan di kawasan Teluk.

Pada masa pemerintahan Clinton, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran juga diwarnai banyak konflik dan ketegangan. Puncaknya adalah ketika Iran menolah proses perdamaian antara Arab-Israel yang disponsori Amerika Serikat. Tuduhan bahwa Iran mencoba mengembangkan persenjataan nuklir juga sudah dilontarkan pada masa pemerintahan Clinton. Tudingan sebagai negara pendukung teroris juga sudah dikumandangkan Amerika Serikat pada Iran ketika Clinton berkuasa. Pada saat itu Amerika Serikat menganggap dukungan Iran terhadap para pejuang Hizbullah di Lebanon dikategorikan sebagai dukungan terhadap terorisme internasional.

Sikap keras Amerika Serikat terhadap Iran terlihat pada isi dari dokuman yang menjadi pegangan Amerika Serikat dalam menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan di negaranya, yang berbunyi “*Our strong preference and common*

*practice is to address proliferation concerns through international diplomacy, in concert with the key allies and regional partners. If necessary, however, under long-standing principles of self defense, we do not rule out the use of force before attacks occur, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy's attacks. When the consequences of an attack with (weapons of mass destruction) are potentially so devastating, we cannot afford to stand idly by as grave dangers materialize. This is the principle and logic of preemption. The place of preemption in our national security strategy remains the same. We will always proceed deliberately, weighing the consequences of our actions. The reasons for our actions will be clear, the force measured, and the cause just.<sup>27</sup>*

Petikan diatas merupakan isi dari dokumen NSS-2002 yang dikeluarkan Bush pasca peristiwa 11 September 2001, yang membuktikan bahwa Amerika akan melakukan tindakan secara keras terhadap segala ancaman yang berkaitan dengan penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk di dalamnya ancaman potensial yang muncul dari negara Iran berkaitang dengan penggunaan nuklir. Isu ini muncul ke permukaan sebagai reaksi Amerika Serikat terhadap pernyataan dari Presiden Iran, Ahmadinejad yang menyatakan kebenciannya terhadap Israel dan keinginannya untuk menghancurkan sekutu erat Amerika Serikat tersebut. Dengan adanya dokumen itu, Amerika Serikat juga dilegalkan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap negara yang dikategorikan bermasalah atau lebih dikenal dengan sebutan *Rogue State*.

Menurut kategori *Rogue State* seperti yang telah dijabarkan ciri-cirinya oleh dokumen kebijakan Amerika yaitu NSS-2002, Iran termasuk ke dalam kategori negara yang mengancam keamanan Amerika dan juga secara internasional. Iran termasuk dalam ciri-ciri negara yang mengabaikan hukum internasional,

---

<sup>27</sup> "United States Issues New National Security Document, Reaffirms Possible Preemptive Use of Force", Source: The American Journal of International Law, vol.100 No.3 (July 2006) <http://www.jstor.org/stable/4091378> diakses pada 16 Mei 2009 pada pukul 14:44

mengancam negara-negara di sekitarnya, memiliki senjata pemusnah massal serta teknologi militer yang maju yang digunakan untuk mengancam, ofensif, atau mencapai tujuan agresi rezim penguasa, menjadi sponsor terorisme yang bersifat global (dalam hal ini Iran dicurigai sebagai pendukung jaringan Al-Qaeda), dan menolak implementasi dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan pada pidato Bush ketika menyampaikan mengenai strategi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran.

*“Radical Shia elements some supported by Iran, formed death squads. And the result was a vicious cycle of sectarian violence that continues today. The consequences of failure are clear: Radical Islamic extremists would grow in strength and gain new recruits. They would be in a better position to topple moderate governments, create chaos in the region, and use oil revenues to fund their ambitions. Iran would be emboldened in its pursuit of nuclear weapons”<sup>28</sup>*

Dari situ dapat dilihat bahwa Amerika menganggap kekuatan politik Islam di Iran sebagai hal yang dapat mengancam keamanan nasional maupun internasional dengan menjadikan minyak sebagai alat mereka untuk memenuhi ambisi mereka yang salah satunya adalah penguasaan senjata nuklir.

Amerika Serikat sangat berkeberatan apabila Iran dibiarkan menguasai teknologi nuklir, walaupun bukan diperuntukkan bagi tujuan persenjataan, karena Amerika Serikat beranggapan bahwa akan ada tiga dampak besar bila Iran dibiarkan menguasai teknologi nuklir:

1. Negara-negara lain di kawasan Teluk (Saudi Arabia, Mesir, Suriah, dan Turki) akan mengikuti langkah Iran sehingga dikhawatirkan akan terjadi perlombaan senjata.
2. Iran dapat memanipulasi harga minyak
3. Meningkatnya teroris dengan target utama adalah Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara di Eropa

---

<sup>28</sup> pidato George W. Bush ketika menyampaikan strategi baru untuk menyelesaikan konflik Iran, 10 Januari 2007,

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/200702110-7.html>

Pada permulaanya Amerika Serikat mencoba cara halus dalam menyikapi program nuklir Iran, diantaranya melalui perundingan-perundingan baik secara langsung antar kedua belah pihak maupun melalui perantara IAEA dan DKK PBB. Namun sepertinya kesabaran Amerika mulai habis karena Iran sepertinya tidak pernah mengindahkan ancaman-ancaman AS dan juga IAEA bahkan sanksi yang dijatuhkan pun dianggap sepele oleh Iran, hal itu terbukti dengan makin gencarnya Iran melakukan pengembangan program nuklirnya.

Bahkan setelah tragedi 9/11 dan selesainya perang Irak yang berakhir dengan pendudukan pasukan Amerika Serikat di Irak, pemerintah Bush masih beritikad untuk melanjutkan upaya perundingan dalam penyelesaian krisis nuklir Iran. Amerika Serikat menilai Iran dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam menciptakan pemerintah Irak yang stabil dan bersifat pluralistik. Di samping itu Iran merupakan salah satu faktor kunci dalam memelihara dan menjaga kestabilan kawasan Timur Tengah<sup>29</sup>.

Namun setelah terbitnya US National Security Strategy 2002, Amerika Serikat mengubah haluan kebijakan luar negerinya dengan mengaitkan Iran, Irak, dan Korea Utara sebagai poros kejahatan (Axis of Evil). Sikap Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran didasarkan atas beberapa faktor:

1. Amerika Serikat menilai bahwa program pengayaan uranium merupakan teknologi *dual use*; dapat digunakan untuk kepentingan damai maupun program senjata nuklir, seperti halnya kasus nuklir India pada dekade 60-an. Bila Iran mampu mengembangkan senjata nuklir, maka kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah akan berubah drastis. Kondisi ini akan mendorong negara-negara lain di Timur Tengah untuk ikut mengembangkan senjata nuklir.
2. Selama ini Amerika Serikat menuduh Iran memiliki hubungan dengan beberapa organisasi teroris internasional, kelompok garis keras Islam ( Hamas dan Jihad Islam), serta kelompok perlawanan Syiah di Irak, seperti Moqtada

---

<sup>29</sup> Brzezinski, Zbigniew and Robert M. Gates, "Iran: Time for a New Approach", New York: Council on Foreign Relations, 2004, [http://www.cfr.org/pdf/Iran\\_TF.pdf](http://www.cfr.org/pdf/Iran_TF.pdf)

Al Sadr dengan tentara Mahdi-nya. Adanya indikasi hubungan antara kelompok Moqtada Al Sadr dengan Iran juga dikemukakan oleh Smith Al Hadar. Bila Iran dibiarkan menguasai senjata nuklir, dikhawatirkan teknologi tersebut akan didistribusikan pula kepada kelompok-kelompok tersebut.

3. Amerika Serikat berpendapat bahwa dengan cadangan minyaknya yang besar, Iran tidak memerlukan reaktor nuklir untuk mencukupi kebutuhan energi listriknya. Terlebih dari sisi ekonomis, reaktor nuklir membutuhkan investasi yang lebih besar daripada pembangkit listrik berbahan bakar minyak.
4. Sikap pemimpin Iran yang berhaluan keras yang dalam beberapa forum formal tidak mengakui eksistensi negara Israel dan mengancam akan menghancurkan Israel

Amerika Serikat dalam upayanya untuk menormalisasikan hubungan dengan Iran memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Iran, diantaranya<sup>30</sup>:

1. Iran tidak boleh menentang laju perdamaian di Timur Tengah dan harus mengakui secara resmi rezim Zionis Israel.
2. Iran harus menghentikan dukungannya pada kelompok-kelompok pejuang Palestina seperti Jihad Islami dan HAMAS, begitu juga kelompok Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat juga menuntut pemutusan hubungan apapun antara kelompok-kelompok anti-Zionis ini dengan Republik Islam Iran.
3. Iran harus menghentikan usaha apapun untuk memproduksi senjata penghancur massal, sebab hal ini dalam sudut pandang Amerika Serikat bisa mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
4. Iran harus menghormati Hak Asasi Manusia dengan menghormati hak-hak minoritas berdasarkan agama, sekte dan ras, serta hak-hak wanita sebagai tudingan terpenting yang ditohokkan pada Iran.

Namun hingga sekarang upaya menetralsir hubungan tersebut menghadapi jalan buntu, karena syarat-syarat yang diberikan Amerika dianggap Iran tidak adil

---

<sup>30</sup> El-Gogary, Adel, hal.224

karena hanya menguntungkan sebelah pihak yaitu Amerika saja. Lagipula kebijakan Amerika jelas-jelas berstandar ganda karena apabila ia melarang Iran mengembangkan program nuklir walaupun untuk tujuan damai, seharusnya Amerika Serikat juga menerapkan hal yang sama pada Israel yang jelas-jelas mengembangkan persenjataan nuklir. Yang terjadi malah Amerika Serikat mendukung secara terang-terangan Israel yang jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Hal itu sangatlah masuk akal karena memang pemerintahan Amerika Serikat banyak dikuasai oleh kaum Zionisme yang memegang banyak posisi penting di Gedung Putih, jadi sampai kapanpun Amerika Serikat akan tetap memberikan dukungan terhadap Israel dan akan berupaya menyingkirkan pihak-pihak yang menentangnya. Atas dasar sikap inilah, Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan luar negerinya dianggap berstandar ganda karena apabila ia menentang Iran dalam program nuklirnya, maka ia seharusnya juga melakukan hal yang sama terhadap negara-negara lain seperti India, Pakistan, dan Israel.

### **3.5. Strategi Diplomasi Amerika Serikat dalam menghadapi Program Nuklir Iran**

Berbagai macam cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk meminta Iran menghentikan program nuklirnya, dari cara mengeluarkan pernyataan secara langsung baik melalui Menteri Luar Negerinya atau langsung dari mulut Presiden, hingga meminta DKK PBB untuk mengeluarkan resolusi dan memberi sanksi kepada Iran.

Ada beberapa aspek dalam strategi diplomasi yang dijalankan Amerika Serikat terhadap Iran<sup>31</sup>:

1. Assesment yang akurat terhadap potensi ancaman. Belajar dari kasus Irak ketika Bush memutuskan untuk menyerang, kesalahan dalam mengumpulkan informasi intelijen dan menganalisa potensi ancaman berakibat sangat fatal.

---

<sup>31</sup>Cirincione, Joseph, "Controlling Iran's Nuclear Program", <http://www.issues.org/23.3/cirincione.html>

Tuduhan pengembangan dan kepemilikan senjata pemusnah massal ternyata tidak terbukti.

2. Mendiskreditkan legitimasi program nuklir Iran agar negara lain tidak menjadikannya contoh.
3. Meningkatkan tekanan atau konsekuensi ekonomi apabila menentang kesepakatan NPT.
4. Menjalin kesepahaman dengan Rusia untuk tidak memberikan bantuan dan dukungan.
5. Mencegah Iran agar tidak dapat mengganggu jalur pengiriman minyak dengan mengajukan proposal Montreux.
6. Menawarkan insentif ekonomi dan kemudahan diplomasi bila Iran mau menghentikan program.

Namun dari berbagai macam cara atau diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat selalu menghadapi jalan buntu, karena hingga detik ini Iran masih menjalankan program pengembangan nuklirnya. Amerika Serikat memang paling sering melontarkan ancaman terhadap Iran berkenaan dengan program nuklir negara tersebut, dan diplomasi yang paling sering dijalankan Amerika Serikat adalah diplomasi koersif.

Diplomasi Koersif merupakan suatu tindakan terukur yang dapat meningkatkan biaya atau menimbulkan penderitaan sehingga memaksa orang atau organisasi mengubah pendiriannya<sup>32</sup>.

Dalam kasus Iran, Koersif punya tiga tujuan:

1. Menimbulkan penderitaan yang mampu mengubah pandangan para pemimpin Iran untuk menaati NPT dan terutama keinginan Amerika.
2. Mencegah niat Iran untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir.

---

<sup>32</sup> Perkovich, George & Silvia Manzanero, "Iran Gets the Bomb-Then What?" yang terdapat dalam jurnal ilmiah yang bertajuk "Getting Ready for a Nuclear Ready Iran" hal. 179.  
<http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2005/PUB629.pdf>



3. Memberi contoh bagi negara lain agar mereka tidak berniat untuk mengembangkan program nuklir baik untuk tujuan damai. Karena apabila hal tersebut sampai terjadi, dapat dipastikan berakhir pulalah unilateralisme dan hegemoni AS di dunia internasional.

Biasanya diplomasi koersif ini dijalankan bersamaan dengan dikeluarkan sanksi baik secara politik, ekonomi, dan militer.

1. Sanksi Politik

Berupa ancaman bahwa negara Barat akan memutuskan hubungan dengan Iran. Isolasi politik hanya akan menunda program nuklir Iran karena para golongan konservatif tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sanksi ini dianggap sebagai sanksi yang paling lemah, karena tidak terlalu berpengaruh pada keadaan dalam negeri Iran.

2. Sanksi Ekonomi

Sanksi ini dianggap sebagai tindakan yang paling jitu, karena ekonomi Iran sangat rentan, tingkat pengangguran tinggi. Oleh sebab itu sanksi yang dianggap paling tepat adalah sanksi terhadap investasi asing dan larangan ekspor minyak, gas bumi, dan komoditas lain. Namun sepertinya sanksi inipun masih bisa diatasi Iran karena memiliki beragam basis produksi untuk produk-produk konsumtif utama sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain. Selain itu dengan 'bersenjatakan' minyak, Iran dapat mengobarkan ancaman untuk memutuskan pasokan minyak ke negara-negara yang memusuhinya sehingga berakibat harga minyak akan melonjak. Namun di sisi lain, minyak juga menjadi kelemahan bagi Iran karena kilang-kilang pemompaan dan pemrosesan berada dalam kondisi yang tidak bagus sehingga terjadi lonjakan permintaan dalam negeri terhadap bensin. Masalah gas juga menjadi beban bagi Iran karena walaupun Iran merupakan negara yang memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, Iran tetap mengimpor bahan ini untuk penggunaan dalam negeri. Dan teknologi dan investasi asing juga dibutuhkan Iran untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri terhadap energi. Tapi Iran tetap tidak gentar karena spekulasi bahwa beberapa negara

seperti Cina dan India yang telah menandatangani kontrak jangka panjang bernilai miliaran dollar tidak bisa lepas dari Iran dengan begitu mudah.

### 3. Sanksi Militer

Amerika Serikat berniat melakukan serangan udara terbatas hanya terhadap infrastruktur dan fasilitas nuklir Iran apabila Iran masih bersikeras dengan program nuklirnya. Namun banyak kalangan menilai bahwa Iran pun tidak akan tinggal diam apabila negaranya diserang secara militer, kemungkinan besar negara mullah tersebut akan balik melakukan serangan dengan tidak kalah dahsyatnya.

Sampai saat ini ancaman militer yang dilontarkan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya belum menjadi kenyataan dan Iran menganggap hal itu sebagai salah satu modus perang urat syaraf karena dimaksudkan hanya untuk membuat Iran gentar dan takut lalu kemudian memutuskan untuk tunduk pada kehendak Amerika Serikat.

Selain itu memang tidak semudah itu untuk melakukan serangan terhadap Iran seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak dan Afghanistan, karena ada sejumlah faktor penting yang membatasi reaksi militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (terutama Israel) untuk menyerang dan menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Penundaan sanksi militer dan lebih memilih sanksi ekonomi dan politik terhadap Iran dilatar-belakangi oleh sejumlah faktor penyebab antara lain sebagai berikut<sup>33</sup>:

*Pertama*, Iran memiliki kemampuan tangkis militer yang mampu memukul target-target Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Irak, hingga Tel Aviv, setelah ia berhasil mengembangkan sejumlah rudal, terutama yang paling menonjol Rudal "Shihab-3" yang bisa membawa tiga hulu ledak perang sekaligus, sehingga bisa menyesatkan sistem pertahanan darat dan rudal-rudal anti (penangkis). Daya jelajah rudal ini juga mencapai 1.700 km dan bisa mengangkut beberapa hulu ledak nuklir yang memungkinkannya untuk mencapai wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan ini merupakan

---

<sup>33</sup> El-Gogary, Adel. Hal. 262-266

ancaman langsung bagi Tel Aviv dan fasilitas-fasilitas AS. Lebih gawat lagi jika Iran sampai memproduksi bom nuklir.

*Kedua*, Iran memiliki massa intelijen, legal personality, dan militer yang sangat besar di Irak baru yang dikuasai kaum Syiah di bawah pendudukan Amerika Serikat. Dan eksistensi serta kepemimpinan kaum Syiah di Irak telah diakui seluruh pihak, baik AS maupun kaum Sunni Irak. Kenyataan ini mempermudah jalan Iran untuk mendukung perlawanan Irak atas pendudukan Amerika Serikat atau langsung masuk Irak dan menghancurkan pasukan Amerika Serikat, apalagi di bawah kekuasaan Badr yang berafiliasi pada Dewan Tertinggi Revolusi Islam Iran dan dilindungi Iran selama rezim Saddam.

*Ketiga*, Teheran mampu membidik armada-armada laut Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai sasaran tembak dengan berbagai sarana perang, apalagi armada-armada ini bersebaran langsung dengan armada-armada laut Iran. Lebih lanjut, Iran mampu menghentikan lalu lintas pelayaran di Teluk Hormus yang sangat vital bagi aktivitas pengangkutan minyak ke Barat dan lalu lintas pelayaran. Teluk Arab rentan ditutup secara keseluruhan seandainya Iran menenggelamkan sebuah kapal di gerbang Hormus. Dengan skala yang sama, Iran bisa mengancam pangkalan-pangkalan AS di negara-negara Teluk sekaligus mengancam jalur lalu lintas minyak dari Teluk ke Barat. Kemampuan ini semakin menguat setelah pengumuman Teheran atas keberhasilannya melakukan percobaan terhadap apa yang disebutnya sebagai rudal bawah air yang tercepat di dunia.

*Keempat*, Iran memiliki aliansi (sekutu) kuat di Lebanon Selatan yang mampu membuat panik Israel dan melancarkan serangan-serangan ke kota Israel bagian utara, yaitu Hizbullah. Melalui sekutunya ini juga, Iran bisa menciptakan banyak masalah bagi kepentingan-kepentingan AS di kawasan Teluk.

*Kelima*, Iran tahu persis bahwa angkatan bersenjata Amerika Serikat telah mulai menipis akibat serangan-serangan di Irak, Afghanistan, dan kawasan-kawasan lain di dunia, termasuk di dalam negeri Amerika Serikat sendiri yang masih terus terancam. Mereka juga mengetahui kuatnya tekanan-tekanan internal dari rakyat Amerika Serikat untuk menghentikan campur tangan Amerika Serikat di dunia internasional yang telah mencoreng citra negeri mereka dan menambah kekerasan

serta antipati terhadapnya. Karena itu Teheran pun bergerak sesuai dengan teori bahwa harga perang lebih rendah daripada harga menyerah, dan orang yang menyerah atau patuh pada tuntutan-tuntutan Amerika Serikat harus membayar harga sangat mahal, yaitu kehormatan rakyat mereka yang jauh lebih besar dibanding harga konfrontasi.

*Keenam*, ada kesulitan tersendiri untuk mengebom fasilitas-fasilitas nuklir Iran karena tingkat penyebarannya di berbagai wilayah dan daerah pemukiman (162 pusat riset). Mantan Direktur CIA, Robert Gates mengatakan, *“Serangan seperti ini tidak bisa diharapkan efektif, akan tetapi ia justru akan membahayakan kepentingan AS, sebab Iran memiliki sejumlah fasilitas nuklir yang tersebar di pelosok negara, sehingga akan menyulitkan Israel untuk membidik situs-situs nuklir utama Iran yang terletak di tengah perkotaan atau di dekatnya”*

Bahkan jika seandainya serangan bom ini bisa dikontrol dan dibatasi hanya pada reaksi cepat Iran menyerang Israel dengan rudal-rudal balistik, maka serangan bom ke reaktor-reaktor nuklir Iran akan semakin membuka banyak serangan pada personil pasukan dan fasilitas Amerika Serikat di Irak dan negara-negara Teluk. Lebih gawat lagi, serangan ini bisa pula membarakan setiap jengkal kawasan Timur Tengah yang nyata-nyata telah membara sejak invasi Amerika Serikat ke Irak dan pemanasan hubungan Amerika Serikat -Suriah hingga keterjurumusan Lebanon dalam perang saudara lagi.

Oleh sebab itu tidaklah semudah itu mengancam Iran baik dengan sanksi-sanksi yang telah maupun akan dijatuhkan karena sepertinya Iran sudah siap menghadapi segala kemungkinan bahkan yang terburuk sekalipun yaitu serangan militer. Karena Iran telah belajar dari pengalaman yang terjadi pada Irak dan Afghanistan, sehingga Iran tidak akan begitu saja menyerah tanpa perlawanan terhadap serangan Amerika Serikat dan para sekutunya.

Amerika Serikat pun akan mengalami kesulitan untuk menekan Iran berkaitan dengan program nuklirnya karena semakin Amerika berupaya mengumpulkan dukungan dari negara-negara besar lainnya untuk melawan Iran, maka Iran akan semakin berusaha keras menjelaskan sikapnya ke masyarakat dunia dan terutama kepada pemerintah negara-negara tetangga. Dan sejumlah

negara Non-Blok dan negara dunia ketiga telah menyatakan dukungannya terhadap Iran.

Selain itu selama Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya menerapkan standar ganda dimana mereka menutup mata terhadap bom-bom nuklir yang dimiliki Israel dan juga berbagai pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap warga Palestina, maka Iran tidak akan mau menuruti permintaan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Apabila Israel diperbolehkan menguasai teknologi nuklir dan bahkan mengembangkannya untuk tujuan persenjataan, maka Iran yang berniat menggunakannya untuk tujuan damai seharusnya lebih diberikan dukungan bukannya malah ditentang habis-habisan seperti yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat beserta para sekutunya.

